

PERANAN PELAJAR DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

SAVITRI ADITIANY

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjajaran

Dalam menghadapi era globalisasi yang berkembang sangat cepat serta untuk membangun integritas ekonomi yang kuat antar anggota ASEAN maka dibentuk ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Keberadaan MEA ini tentu saja menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dimana Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak menjadi salah satu potensi pelaksanaan MEA 2015. Tentu saja potensi tersebut harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas SDM tentu saja tidak dapat dilepaskan dari yang namanya pendidikan karena pendidikan merupakan unsur penting yang harus mendapat prioritas utama. Pendidikan diharapkan mempunyai outcome berupa life skill, yang menjadi bagian konsep dasar pendidikan nasional untuk menciptakan generasi muda yang handal, memiliki daya kreativitas yang tinggi serta mampu bersaing dengan negara lain.

Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya dan kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam menghadapi MEA khususnya dalam bidang pendidikan serta upaya pelajar dalam menghadapi MEA. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis dan metode kepustakaan yaitu berdasarkan referensi buku-buku, jurnal ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan MEA.

Keywords : Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pasar Bebas, Pendidikan, dan Pelajar

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi era globalisasi yang berkembang sangat cepat serta untuk membangun integritas ekonomi yang kuat antar anggota ASEAN maka dibentuk ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan satu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara, bertujuan untuk meningkatkan investasi asing di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang juga akan membuka arus perdagangan barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara di Asia Tenggara. Pada awalnya MEA direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan hasil pertemuan di Bali tahun 2003, namun pada pertemuan di Filipina yang diselenggarakan pada 13 Januari 2007, para negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Percepatan keputusan negara ASEAN untuk membentuk MEA yang pada awalnya akan dimulai pada tahun 2020 menjadi 2015, hal tersebut menggambarkan tekad ASEAN untuk segera meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan daya saing antar sesama negara anggota ASEAN untuk menghadapi persaingan global.

Pembentukan ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi akan membuat ASEAN lebih kompetitif dengan mekanisme dan langkah baru guna memperkuat pelaksanaan inisiatif – inisiatif ekonomi yang ada, mempecepat integrasi kawasan – kawasan prioritas, memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat dan memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN.

Dalam AEC blue print integrasi ekonomi kawasan disetarakan dengan percepatan liberalisasi. Aturan – aturan yang dibuat dalam AEC dibuat sedemikian rupa agar selaras dengan aturan – aturan internasional cetak biru tersebut dalam usahanya mengakses pasar eksternal (menjadikan ASEAN sebuah kawasan kompetitif, meliberalisasi seluruh area ekonomi) ketimbang usaha pengembangan sebuah pasar kawasan di dalamnya (internal). Liberalisasi

telah menjadi tujuan utama dari integrasi ekonomi ASEAN karena segala bentuk perlindungan dinilai sebagai hambatan bagi kemajuan ASEAN (Edy Burmansyah, 2014).

LANDASAN TEORI

Sejarah menunjukkan bahwa negara - negara yang tinggi peradabannya selalu disokong oleh kekuatan ekonomi yang hebat (Cameron, 1997). Tercatat kerajaan kerajaan yang berada disekitar laut Tengah dan Timur Tengah muncul karena kekuatan ekonomi dan kemudian militernya. Terkadang dengan kekuatan militernya menyerbu negara lain untuk diambil kekuatan ekonominya. Negara tersebut menjadi semakin kuat baik secara ekonomi dan militer. Dengan cara ini, daya saing suatu negara dalam berdagang tidak saja didasarkan atas unggulnya produksi mereka tetapi juga ancaman militer yang senantiasa menakutkan negara.

Pasca Perang Dunia II pendekatan militer dan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional perlahan - lahan hilang kepopulerannya. Sejak tahun 1945 dunia mengalami polarisasi baru yakni berada diantara dua system yang sama sekali berbea; pertama system territorial yang menekankan pada penguasaan wilayah kedua system oceanic atau perdagangan, sebagai warisan kebijakan inggris sejak tahun 1850-an dan yang dipakai negara- negara dikawasan Atlantik dan Pasifik (Richard Rosecrance, 1991).

Sejak berakhirnya Perang Duia II, pendekatan territorial tidak lagi dominan digunakan meskipun masih tetap digunakan negara - negara besar/maju cenderung lebih mengutamakan pendekatan *soft power* melalui intervensi kebijakan dan perdagangan, karena dinilai lebih efektif dan murah.

David Harvey, dalam bukunya imperialism baru dengan baik mengutip Hegel untuk menunjukkan keterkaitan perdagangan dengan imperialism. "Kontradiksi - kontradiksi internal dari masyarakat borjuis yang terlihat sebagai over-kumulasi kekayaan disatu kutub dan penciptaan tumpukan kemiskinan di kutub lain, mendorong masyarakat borjuis untuk mencari solusinya lewat perdagangan luar negeri dan lewat praktek - praktek colonial/imperial (David Harvey, 2010).

Pasca Perang Dunia II tekanan - tekanan untu mengadopsi perekonomian terbuka dan pentingnya membiarkan pasar-pasar ekspor tetap terbuka bagi usaha untuk mencegah depresi ekonomi (sebagaimana yang terjadi pada tahun 1929 -1931), semakin mengemuka, terutama dating dari Amerika Serikat.

Memasuki akhir tahun 1990-an prinsip-prinsip perdagangan bebas kembali mendominasi perdagangan internasional. Dibawah kepemimpinan Amerika Serikat, pergadagangan internasional digiring kearah liberalism ekonomi.

Pada perkembangan selanjutnya makna perdagangan bebas tidak hanya mencakup pertukaran barang yang melintas batas-batas negara namun juga mencakup hall in yang tidak berhubungan langsung dengan perdagangan misalnya bidang jasa, bidang hak asasi atas kekayaan intelektual (HAKI), investasi, lalu lintas tenaga kerja, infrastruktur dan sebagainya (Edy Burmansyah, 2014).

Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN terdiri dari atas lima elemen inti yaitu arus barang yang bebas, arus jasa yang bebas, arus investasi yang bebas, arus modal yang lebih bebas, dan arus tenaga kerja terampil yang bebas. Dimana dari kelima elemen tersebut merupakan peluang dand tantangan bagi bangsa Indonesia.

PEMBAHASAN

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari lima sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.

Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi MEA / AEC, antara lain :

1. Penguatan Daya Saing Ekonomi

Pada 27 Mei 2011, Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan *Groundbreaking* sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur.

2. Program ACI (Aku Cinta Indonesia)

ACI (Aku Cinta Indonesia) merupakan salah satu gerakan '*Nation Branding*' bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres No.6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementerian Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, *entertainment*, pariwisata dan lain sebagainya. (dalam Kemendag RI : 2009:17).

3. Penguatan Sektor UMKM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin mengadakan mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah 'Pameran Koperasi dan UKM Festival' pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah.

Selain itu, persiapan Indonesia dari sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk menghadapi MEA 2015 adalah pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015, yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan KUKM mengenai pemberlakuan MEA pada akhir 2015.

Adapun langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu pelaku KUKM menyongsong era pasar bebas ASEAN itu, antara lain peningkatan wawasan pelaku KUKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk KUKM lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Namun, salah satu faktor hambatan utama bagi sektor Koperasi dan UKM untuk bersaing dalam era pasar bebas adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku KUKM yang secara umum masih rendah. Oleh karena itu, pihak Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan pemberdayaan KUKM yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk, agar mampu meningkatkan kinerja KUKM untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi.

Pihak Kementerian Perindustrian juga tengah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sektor industri kecil menengah (IKM) yang merupakan bagian dari sektor UMKM. Penguatan IKM berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang atau jasa untuk dieskpor. Selain itu, koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan kementerian pun terus ditingkatkan sehingga faktor penghambat dapat dieliminir

4. Perbaikan Infrastruktur

Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil, selama tahun 2010 telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan :

- a. Perbaikan Akses Jalan dan Transportasi
- b. Perbaikan dan Pengembangan Jalur TIK
- c. Perbaikan dan Pengembangan Bidang Energi Listrik.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:36).

6. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan

Dalam rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian.

PERAN PELAJAR /MAHASISWA DALAM MENGHADAPI MEA

Keberadaan MEA ini tentu saja menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dimana Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak menjadi salah satu potensi pelaksanaan MEA 2015. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dengan berbagai jenis suku, bahasa dan adat istiadat yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi di dunia ketiga (4,5%) setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India. Ini akan menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju MEA tahun 2015. Namun pertumbuhan penduduk yang pesat ini akan menjadi tantangan tersendiri jika Indonesia tidak dapat menciptakan SDM yang bermutu dan memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi era globalisasi khususnya dalam menghadapi tantangan pasar bebas ini. Jika SDM Indonesia tidak memiliki kualitas yang baik dan daya saing yang tinggi dalam menghadapi MEA akan mengakibatkan negara hanya akan menjadi pasar bagi produk – produk luar dan negara kita hanya akan menjadi konsumen dan penonton negara lain yang lebih maju dan unggul dalam hal SDM dan produk.

Pertambahan penduduk tersebut selain merupakan peluang juga dapat menjadi resiko dalam implementasi MEA, selain hal tersebut terdapat pula resiko-resiko lain yang akan dihadapi nantinya, seperti bagaimana kesiapan sumber daya manusia, hasil produk, kesedianya infrastruktur yang baik, kebijakan pemerintah yang diambil dan lainnya. Untuk mengatasi resiko-resiko tersebut diperlukan adanya kerjasama antara otoritas negara dan para pelaku usaha, infrastruktur baik secara fisik dan sosial (hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas SDM tentu saja tidak dapat dilepaskan dari yang namanya pendidikan. Pendidikan merupakan unsur penting yang harus mendapat prioritas utama. Sebagaimana dinyatakan Ki Hadjar Dewantara dalam Setuju (2015:2) bahwa “Pendidikan merupakan daya upaya memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak, dimana bagian-bagian tersebut tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita”. Senada dengan hal tersebut, pendidikan diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan seutuhnya setiap orang, baik jiwa, raga, inteligensi, kepekaan, estetika, tanggung jawab, dan nilai-nilai spiritual. Melalui pendidikan, setiap orang hendaknya dapat diberdayakan untuk berpikir mandiri dan kritis. Da-

lam dunia yang terus berubah dan diwarnai oleh inovasi sosial dan ekonomi, pendidikan tampak sebagai salah satu kekuatan pendorong untuk meningkatkan kualitas imajinasi dan kreativitas sebagai ungkapan dari kebebasan manusia dan standarisasi tingkah laku perorangan. Kesempatan atau peluang perlu diberikan kepada generasi muda untuk melakukan percobaan dan menemukan sesuatu yang baru (UNESCO, 1996: 94).

Pendidikan diharapkan mempunyai outcome berupa life skill, yang menjadi bagian konsep dasar pendidikan nasional. Life skill merupakan kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam menjalani proses kehidupan. Sehingga sanggup bersaing dan terampil dalam menjaga kelangsungan hidup dan tantangan pada masa depan (M takdir ilahi, 2012). Hal yang perlu disiapkan dalam menghadapi MEA adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari anggota MEA itu sendiri. Penyiapan sumber daya manusia yang dilakukan salah satunya melalui jalur pendidikan tinggi yaitu pada mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus. Mahasiswa yang rata-rata berusia 20 tahun, merupakan aset bangsa yang sangat berharga karena mahasiswa masih berada pada masa-masa keemasan dalam mencari jati diri. Sehingga mahasiswa lulus dengan harapan sudah mempunyai beberapa kompetensi atau memiliki kemampuan (skill) pada dirinya.

Kebijakan Daya Saing Tenaga Kerja dari Sisi Pendidikan Peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia dari sisi pendidikan dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN telah dilakukan melalui kebijakan dari kementerian terkait. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia dan Kamar Dagang Industri Nasional (KADIN) telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing tersebut. Hal ini dituangkan di antaranya ialah:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan system pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Contohnya ialah telah diimplementasikan dengan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bawah naungan dari Asosiasi-asosiasi profesi bidang.
2. Dalam sistem berbasis kompetensi ini terdapat tiga komponen yang saling berhubungan yaitu standar kompetensi, pelatihan berbasis kompetensi, dan sertifikasi kompetensi. Contoh yang diimplementasikan dengan menghubungkan kebijakan kurikulum pendidikan vokasional perawat (SMK, Diploma),

lembaga sertifikasi profesi (Kementerian Kesehatan), dan penyelenggaraan sertifikasi di Indonesia.

Berdasarkan data BPS sebelumnya, sumber daya manusia Indonesia belum mampu menghadapi era MEA karena hampir 50 persen angkatan kerja lokal hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Lulusan perguruan tinggi juga hanya berkisar 10 persen. Hal tersebut tentu saja sangat miris sekali dimana angka penduduk yang pendidikannya masih rendah masih banyak dan dikhawatirkan tidak dapat bersaing dengan tenaga yang berkualitas dan lebih profesional dari negara lain yang pada akibatnya akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia karena kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Maka dari itu diperlukan adanya upaya untuk membentuk tenaga kerja terampil di Indonesia, selain melalui pendidikan formal dapat juga melalui pendidikan informal seperti kursus dan pelatihan-pelatihan.

Edy Burmansyah dalam bukunya *Rezim baru ASEAN: Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (2014:133)* mengungkapkan bahwa walaupun produktifitas tenaga kerja pada sector jasa mengalami peningkatan, namun secara keseluruhan Indonesia mengalami kesulitan untuk berkompetensi dengan mitra-mitranya di ASEAN. Berdasarkan laporan bank dunia, posisi Indonesia berada sedikit di atas Kamboja. Rendahnya tingkat keterampilan/keahlian tenaga kerja yang ditawarkan, disebabkan kualitas system pendidikan tidak mampu menutup celah keahlian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus pelajar usia 15 tahun di Indonesia memiliki tingkat pengetahuan yang jauh dibawah rekan-rekannya dari Vietnam, walau Indonesia memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi.

Rendahnya keahlian tenaga kerja di Indonesia, membuat perusahaan – perusahaan di Indonesia cenderung mempergunakan tenaga kerja asing untuk mengisi sejumlah posisi/pekerjaan yang ditawarkan.. Bank Indonesia (2009) menyatakan meskipun pertumbuhan jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia agak fluktuatif, namun secara absolut jumlahnya mengalami peningkatan.

Hal tersebut diatas diperkuat oleh pernyataan Bapak Didik (ujar Ketua LP3E Kadin, Didik J Rachbini di kantor Kadin, Jakarta juga menjelaskan, jika dilihat dari kualitas tenaga kerja Indonesia saat ini, pemerintah harus berputar otak supaya para tenaga kerja Indonesia bisa bersaing di MEA. Hal ini dikarenakan, hingga kini hampir separuh atau 47,1 persen

dari tenaga kerja Indonesia adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. "Sehingga ini sulit mendapat tenaga kerja dengan kualifikasi keterampilan dan keahlian yang cukup," kata dia.

KESIMPULAN

Begitu banyak persoalan yang akan dihadapi saat kita menghadapi MEA, namun kita juga harus tetap optimis karena masih banyak sector yang dapat kita kembangkan dan diperkuat agar mempunyai daya saing yang kuat dengan negara lain dalam menghadapi MEA

Seperti disinggung diatas untuk menghadapi MEA ini diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang tidak kalah pentingnya juga kita harus mempersiapkan pemuda-pemudi sebagai ujung tombak kemajuan suatu bangsa agar mempunyai kualitas yang tinggi, profesional, memiliki kreaivitas tinggi, ulet dan mmeiliki daya juang setra tidak mudah menyerah. Program wajib belajar 9 tahun, adanya dana bantuan untuk anak kurag mampu (BOS), Program Indonesia mengajar merupakan salah satu upaya pemerintah dan bantuan masyarakat agar semua warga negara indonesia tidak ada lagi yang buta huruf serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing dengan negara lain.

Pelajar/ mahasiswa di Indonesia harus di dorong dan dipacu daya kreatifitasnya untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan bukannya setelah mereka lulus hanya mengharapakan menjadi pegawai di suatu instansi pemerintah atau swasta tetapi mereka harus berfikiran untuk menadi pemimpin atau owner diperusahaan mereka sendiri dengan dipacu jiwa entrepreneur nya . jumlah entrepreneur di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara – negara lain. Speerti yang diutip dari harian online suara.com pada tanggal 09 Mei 2016 Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bahllil Lahadali mengatakan, saat ini Indonesia baru memiliki 1,5 persen pengusaha.

Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengusaha atau entrepreneur di Indonesia masih sedikit tertinggal jauh dari negara- negara tetangga sedangkan minimal jumlah pengusaha di sebuah negara adalah 4 persen dari total penduduk negara tersebut untuk itu Indonesia meningkatkan jumlah pengusaha yang berkualitas dan terdidik salah satunya yaitu dari kalangan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Burmansyah, Edy Rezim Baru 2014 .ASEAN: Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
- Harvey, David Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer, Resisbook-IGJ, Yogyakarta, 2010.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.2009, "Menuju ASEAN Economic Community 2015", Jakarta.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Informasi Umum: Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hlmn 7
- KPPN/Bappenas.2012."Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013".Buku I.
- KPPN/Bappenas.2013."Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013".Buku II.
- Masyarakat ASEAN.. Edisi 9/September 2015.Media Publikasi Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI